

**RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2018**
(Berdasarkan Renstra Bapedalda 2016-2021)



**BAPEDALDA PROVINSI SUMATERA BARAT
2017**

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja OPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansi penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2018.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Persyaratan penyusunan RAPBD melalui tahap sebagai berikut :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

Adapun bagan alur tahapan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah,

- 6) Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- 7) Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
- 9) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 30);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2017 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Bab I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Landasan Hukum
- c. Maksud dan Tujuan
- d. Sistematika Penulisan

2. Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- a. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu
- b. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- c. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- d. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

3. Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

- a. Telaahan terhadap kebijakan nasional
- b. Tujuan dan sasaran Renja OPD
- c. Program dan Kegiatan Tahun 2018

4. BAB IV PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Rencana tindak lanjut

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 telah melaksanakan 4 (empat) program utama yang tercantum dalam penetapan Kinerja. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016 (n-2) dapat digambarkan pada penjelasan di bawah ini :

- a. Dari 9 program dan 58 kegiatan (belanja pokok + belanja urusan) yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup secara keseluruhan realiasi dari target yang telah ditetapkan adalah sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 95,62%.
- b. Di lihat dari realiasi anggaran per kegiatan, ada 8 kegiatan yang realiasinya berada di bawah realiasi terendah tahun sebelumnya diantaranya : kegiatan Peningkatan Koordinasi Perlindungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati di Sumatera Barat (67,99%); Pembinaan Pemulihan Kualitas SDA dalam rangka peningkatan tutupan vegetasi (75,08%); Peningkatan Pelindungan Lapisan Ozon dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim (70,73%); Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) (78,62%); Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (Penerapan CSR Bidang Lingkungan Hidup) (81, 43%); Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM Laboratorium terakreditasi (81,94%); Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah) (82, 13%); Penaatan Hukum Lingkungan (84,05%).

Hasil prakiraan evaluasi capaian pelaksanaan Renja OPD Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel. 2.1
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP dan PENCAPAIAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2015

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja tahun 2016 s/d 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan OPD Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2017)		CAT
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%) 8=(7/6)		Realisasi Capaian	Target Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	IKLH	71,66		70,88	70,18		71,66		70,99	
	Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi	Jumlah sungai yang didata kualitas air serta sumber pencemarnya sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaannya	55	4	6	6	100	12	22	40	
	Pengawasan Pengendalian Terhadap Pengelolaan Lingkungan Usaha/Kegiatan	Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan wasdal pengelolaan lingkungan	85	21	12	13	108	18	52	61,18	
	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Jumlah objek kegiatan yang dilakukan wasdal kerusakan lingkungan	61	11	10	7	70	12	30	49,18	
		Jumlah Kab/Kota yang pelaku penambangnya dilakukan pemetaan sosial serta diberikan sosialisasi lapangan	5	-	7	0	-	-	-	-	
	Pengkajian Penetapan Status Mutu Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah sungai yang ditetapkan satu mutu air lintas kabupaten/kota	6	1	2	2	100	1	4	66,66	
	Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah)	Jumlah objek kegiatan yang dinilai kinerja pengelolaan lingkungan hidupnya	88	15	15	15	100	18	48	54,54	
	Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penurunan Beban Pencemaran Sungai	Terbentuknya kerjasama dan MoU antara stakeholder dalam penurunan beban pencemaran (limbah padat) pada Sungai Batang Agam	1	-	1	1	100	0	-	-	
		Percontohan pengelolaan limbah	9	-		2	100	2	2	22,22	
		Dokumen kajian	4	-	0	0	-	2	2	50	

					Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih	jumlah kecamatan dan kelurahan yang dibina dan dinilai	76	12	-	-	-	19	19	40,79	
					Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata)	Jumlah sekolah yang dibina dan dinilai dalam program Adiwiyata	367	177	50	153	306	61	391	106,5	
						Jumlah pilot project sekolah adiwiyata	8	-	-	-		2	2	25	
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah peningkatan aplikasi bank sampah	21	-	5	0	100	5	-	-	
						Jumlah Kab/Kota yang dibina terkait aplikasi bank sampah dan peningkatan implementasi konsep 3R	19	-	19	18		19	19	100	
						Jumlah peserta workshop bank sampah	225	-	14	45		-	45	2	
					Pilot project eko dan edu wisata kawasan mandeh	Pembangunan Bank Sampah	-	-	-	-	-	1	1	-	
					Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	IKLH	71,66		70,88	70,18		71,66		70,99	
					Peningkatan Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Laut	Jumlah Kab/Kota kawasan pesisir pantai dan muara sungai yang dipantau kualitas air lautnya	6	6	6	6	100	6	6	100	
					Peningkatan Konservasi Kualitas air danau di Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya koordinasi dan peranserta stakeholder, masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian ekosistem danau	4	4	4	4	100	4	4	100	
						Jumlah danau yang dikoordinasikan peran sert stakeholder, masyarkat dan dunia usahanya dalam pelestarian ekosistem danau	4	-	-	-	-	-	-	-	
					Peningkatan Koordinasi Perlindungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati di Sumatera Barat	Jumlah daerah penyangga di kab/kota yang dibina	14	7	4	4	100	-	11	78,57	
						Jumlah taman kehati yang dibina	19	3	4	-	-	5	8	42,10	
						Jumlah kab/kota yang dibina dalam pengelolaan tutupan vegetasi	19	-	-	-	-	12	12	63,16	
					Sosialisasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan bagi nagari/kelurahan	Jumlah nagari/kelurahan yang dilakukan sosialisasi	-	4	3	3	100	-	-	-	
						Jumlah bibit yang ditanam	-	-	-	-	-	-	-	-	

					Penguatan nagari/kelurahan dalam pembanunan berwawasan lingkungan	Jumlah nagari/kelurahan yang dilakukan penguatan	6	-	-	-	-	2	2	33,33	
						Jumlah bibit yang ditanam	1000	-	-	-	-	2000	2000	50	
					Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (Penerapan CSR Bidang Lingkungan)	Jumlah perusahaan yang dibina dalam melaksanakan program CSR Bidang Lingkungan Hidup	44	13	11	11	100	8	32	72,72	
					Pembinaan Pemulihan Kualitas SDA dalam rangka Peningkatan Tutupan Vegetasi	Jumlah Kab/Kota yang dibina dan dievaluasi dalam peningkatan pengelolaan tutupan vegetasi	12	12	12	12	100	-	-	-	
					Program Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati peraturan perundang-undangan	80%			48,31%		70%			
					Penyelenggaraan Amdal di Provinsi Sumatera Barat	Jumlah kab/kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian dokumen Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL nya	8	15	8	12	150	-	15	187,5	
						Jumlah kab/kota yang dibina/diverifikasi terkait pengajuan lisensi Komisi Penilai Amdalnya	4	4	4	7	175	-	7	175	
					Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penatalaksanaan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup	Jumlah kab/kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian dokumen Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL nya	19	-	0	0	-	11	11	57,89	
						Jumlah kab/kota yang dibina/diverifikasi terkait pengajuan lisensi Komisi Penilai Amdalnya	19	-	0	0	-	6	6	31,58	
					Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan Perizinan LH seta terhimpunnya data hasil pembinan hukum dan perizinan lingkungan	4	7	5	6	120	10	10	250	
						Jumlah kegiatan dan/usaha yang dilakukan pembinaan dan menaati peraturan perundang-undangan bidang LH dan Perizinan	36	2	5	6	120	5	13	36,11	
						Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang tersosialisasikan	4	-	-	-	-	2	2	50	
					Penyusunan UKL-UPL Pembangunan gedung kantor lantai 2 (labor)	Jumlah dokumen UKL-UPL pembangunan gedung kantor lantai 2 yang disusun	1	-	0	1	-	-	1	100	

						Pembinaan KLHS Terhadap Dokumen Perencanaan	Jumlah kab/kota yang dibina dalam pelaksanaan KLHS terhadap dokumen perencanaan	19	7	5	5	100	5	7	36,84		
						Penaatan Hukum Lingkungan	jumlah Kasus Lingkungan Hidup yang dapat diselesaikan dan kegiatan dan/ atau usaha yang dijadikan objek penegakan hukum	34	11	4	12	300	7	29	82,86		
							jumlah objek yang dilakukan monitoring dan evaluasi implementasi penerapan sanksi	26	-	2	2	100	10	12	46,15		
						Pengkajian Pengembangan Kebijakan Wilayah	Penyusunan 1 (satu) paket dokumen daya dukung daya tampung lingkungan Propinsi Sumatera Barat	1	-	-	-	-	-	-	-		
							Bimtek penyusunan dokumen daya dukung daya tampung lingkungan Kab/Kota	1	-	-	-	-	80	80	-		
							Jumlah Kab/Kota yang dibina dan dievaluasi penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan	19	-	-	-	-	19	19	100		
						Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase pengembangan sistem dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	100%					60%				
						Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru)	Jumlah calon yang dibina untuk di usulkan sebagai calon penerima Kalpataru tingkat nasional	44	4	8	8	100	9	20,45			
						Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Jumlah Rangkaian acara Edukasi dan Kampanye Lingkungan Hidup	17	3	2	1	50	4	23,53			
						Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Propinsi Sumatera Barat	Jumlah buku SLHD Prov. Sumbar yang dicetak	240	65	80	80	100	40	16,66			
							Jumlah Kab/Kota yang ditetapkan sebagai Penyusun Buku SLHD terbaik Tingkat Propinsi Sumatera Barat	19		3	3	100	5	26,31			
						Pengembangan Sistim Informasi Lingkungan	Jumlah paket pembuatan sistem informasi lingkungan	5	6 3 61	1	1	100	1	20			

					Pembinaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Prosentase capaian penarapan standar pelayanan minimal (SPM) Propinsi, Kabupaten/Kota dan Pembinaan SPM ke Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	9	1	9	2	22	-	-		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	----	---	---	--	--

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan analisa pencapaian kinerja pada tahun 2016, secara keseluruhan pencapaian kinerja berhasil dicapai dengan persentase capaian sebesar 130,25%, dengan realisasi anggaran sebesar 95,62%.

Di lihat dari trendnya pencapaian kinerja sektor lingkungan hidup menunjukkan trend perkembangan yang baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi sebagaimana tercermin pada beberapa indikator kinerja utama yang belum tercapai sesuai target, antara lain implementasi perizinan lingkungan yang belum maksimal oleh pelaku usaha/industri/kegiatan yang membutuhkan langkah-langkah strategis ke depan untuk peningkatannya.

Sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra (target masih mengacu pada Renstra Bapedalda periode 2016 - 2021) yang harus dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dapat dijelaskan sebagaimana tabel 2.2

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

INDIKATOR		Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2019	
		(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	thn (n-2)	(thn n-1)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	58<IPA<66	58<IPA<66	58<IPA<66	58<IPA<66	65,40			
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	82<IPU<90	82<IPU<90	82<IPU<90	82<IPU<90	82,90			
3	Presentase Komisi Penilai AMDAL (KPA) kab/kota yang telah mengimplementasikan Standar Operating Procedure (SOP) sesuai peraturan perundang-undangan	70%	75%	80%	85%	100%			
4	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	50%	60%	65%	70%	48,31%			
5	Persentase dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dilengkapi Kajian Lingkungan Hidup Strategis	40%	50%	60%	65%	70,37%			
6	Persentase kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan	85%	85%	85%	85%	98,21%			
7	Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi <i>passing grade</i> Adipura dan Gerakan Sumber Bersih	60%	60%	65%	70%	65,11%			
8	Persentase peningkatan keikutsertaan dalam kegiatan penghargaan lingkungan (Adiwiyata dan Kalpataru)	10%	10%	10%	10%	21,61%			
9	Usaha/Kegiatan peringkat biru PROPER yang mengalokasikan CSR untuk pengelolaan LH	20%	55%	60%	65%	21,43%			
10	Persentase Bank Sampah yang aktif dari seluruh Bank Sampah yang terdata Tahun 2015	15%	25%	45%	60%	20,83%			

Berdasarkan tabel 2.1 dan tabel 2.2 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rendahnya realiasi anggaran pada beberapa kegiatan pada table 2.1 disebabkan adanya kebijakan anggaran pada akhir tahun yang lalu.
2. Rendahnya realisasi pada indikator kinerja persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup salah satunya penyebabnya adalah rendahnya tingkat ketaatan pemilik kegiatan dan/atau usaha, dimana faktor ini juga disebabkan oleh beberapa faktor lain diantaranya :
 - 1) Belum semua pemilik kegiatan dan/atau usaha yang memiliki struktur organisasi yang menangani masalah lingkungan hidup.
 - 2) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup kab/kota terhadap pemilik kegiatan dan/atau usaha.
 - 3) Masih terdapatnya objek yang belum memberikan progres dalam pengelolaan lingkungan dan memiliki kendala yang sama tiap tahun penilaian. Kendala dapat bersumber dari objek sendiri seperti pemenuhan parameter baku mutu, bangunan penyimpanan LB3 sedangkan kendala dari Kabupaten/Kota seperti lamanya proses izin pembuangan limbah cair, izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan izin yang diproses oleh Kementerian Lingkungan Hidup yaitu izin operasional insinerator.
 - 4) Belum optimalnya upaya penegakan hukum lingkungan terhadap ketidaktaatan pemilik kegiatan dan/atau usaha.
 - 5) Belum optimalnya mekanisme insentif dari Pemerintah seperti pemberian keringanan pembayaran pajak perusahaan bila perusahaan telah mendapat peringkat Hijau dan Emas dalam PROPER/PROPER Daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan analisis kinerja pelayanan OPD dan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi Prov. Sumbar maka dirumuskan isu Strategis Lingkup Pelayanan Prov. Sumbar beserta faktor pendorong terjadinya permasalahan lingkungan hidup dan tindak lanjut penyelesaian permasalahan lingkungan hidup sebagai tercantum pada tabel 2.3

Tabel 2.3
Isu Strategis Lingkup Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

No	Lingkup pelayanan	Stakeholder	Isu strategis/permasalahan	Faktor Pendorong Terjadinya permasalahan	Faktor Pendorong dari Faktor Pendorong	Arahan tindak lanjut/ Arahan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
1	Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Kehutanan - Dinas Kelautan - Dinas Pariwisata - Dinas Tarkim - DLL 	Penurunan Kualitas Air Sungai Segmen Perkotaan	Aktifitas domestik dan pasar tanpa IPAL	Pengelolaan terpadu limbah perkotaan belum menjadi program strategis kab/kota	Meningkatkan pengawasan, pembinaan dan sosialisasi dalam pengendalian pencemaran sungai
				Aktifitas kegiatan skala kecil/mikro tanpa IPAL (Industri, Hotel dan restaurant, RPH, Bengkel dll)	Pengembangan teknologi sederhana IPAL dan proses produksi bagi kegiatan skala kecil/mikro belum jadi prioritas instansi sektoral	
				Aktivitas pembuangan sampah ke sungai	Pelayanan limbah padat domestik masih terbatas	Harus ada program kerjasama antar sektor dan antar daerah
					Pembangunan kawasan permukiman yang tidak sesuai dengan tata ruang (terutama daerah sempadan sungai)	
			Fluktuasi debit yang signifikan	Kerusakan pada DAS	Masalah perizinan (Illegal logging, PETI, alih fungsi lahan.	<i>Penggunaan lahan agar disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang dan mempertimbangkan Kondisi kualitas sumber Daya Air.</i>
				Kerusakan Sempadan	Alih fungsi hutan ke fungsi pemanfaatan lain (kebun, pertambangan dll)	<i>Memperbaiki dan mengendalikan fungsi sempadan sungai yang merupakan kawasan lindung.</i> <i>Evaluasi perizinan dan disesuaikan dengan RTRW</i> <i>Tindakan penegakan hukum/sangsi bagi para pelaku illegal</i>

No	Lingkup pelayanan	Stakeholder	Isu strategis/permasalahan	Faktor Pendorong Terjadinya permasalahan	Faktor Pendorong dari Faktor Pendorong	Arahan tindak lanjut/ Arahan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
						<i>Koordinasi untuk pengawasan yang intensif bagi stakeholder terkait (Prov.Kab/Kota)</i>
2	Kualitas Udara Ambien	Kab/Kota	Menurunnya kualitas udara yang disebabkan meningkatnya volume kendaraan, industri dan kabut asap	Meningkatnya jumlah kendaraan, industri dan pembakaran lahan	<p>Emisi gas buang kendaraan bermotor</p> <p>Emisi gas buang industri</p> <p>Pembukaan lahan baru</p> <p>Peningkatan jumlah penduduk</p> <p>Peningkatan pendapatan penduduk</p> <p>Meningkatnya jumlah investasi</p>	<p>Melakukan pemantauan kualitas udara ambien secara berkala dan memfollow up hasil pemantauan ke masing - masing Kab/Kota</p> <p>Melakukan koordinasi dengan instansi terkait</p> <p>Pembinaan petani dalam buka lahan tanpa bakar</p>
				Kiriman kabut asap dari Provinsi tetangga	Kebakaran hutan dan lahan	<p><i>Stressing Gubernur di Rakorgub untuk mengurangi jumlah titik api</i></p> <p>Alat pemantau kualitas udara yang otomotasi + kerjasama dengan stasiun koto tabang + peningkatan SDM terkait pemantauan kualitas udara</p> <p>Koordinasi dengan PPE untuk alat PKU portable</p>
3	Pemantauan BPO	Kab/Kota	Masih terdapatnya pemakaian refrigerant dan Bahan Perusak Ozon (BPO) lainnya	Meningkatnya jumlah bengkel dan industri yang masih menggunakan refrigerant tidak ramah lingkungan/oplosan	Harga freon oplosan/tidak ramah lingkungan lebih murah dibandingkan harga freon ramah lingkungan	Melakukan pengawasan penggunaan BPO pada bengkel - bengkel servis peralatan pendingin

No	Lingkup pelayanan	Stakeholder	Isu strategis/permasalahan	Faktor Pendorong Terjadinya permasalahan	Faktor Pendorong dari Faktor Pendorong	Arahan tindak lanjut/ Arahan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
			yang tidak ramah lingkungan pada berbagai sektor di masyarakat yang dapat memicu pemanasan global dan kerusakan lapisan ozon			Meminta kepada instansi terkait (Disperindag) untuk menghentikan penjualan/peredaran BPO yang tidak ramah lingkungan
					Pengetahuan masyarakat dan pelaku usaha bengkel terhadap BPO masih rendah	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait
						Sosialisasi kepada pemilik usaha/kegiatan dan masyarakat
4	Kualitas Air Danau	Kab/Kota	Menurunnya kualitas air danau	Meningkatnya jumlah aktifitas di kawasan danau		Melakukan pemantauan kualitas air danau secara berkala
				Kerusakan hutan pada daerah resapan (catchment area) yang mengancam keberlangsungan ketersediaan air danau		Melakukan koordinasi dengan instansi terkait
				Pengelolaan sampah di sekitar danau yang belum optimal		Sosialisasi kepada pemilik usaha/kegiatan dan masyarakat terkait pengelolaan kawasan danau
			Kematian ikan massal	Banyaknya keramba yang melebihi daya dukung danau	Perda Zonasi Danau belum ditetapkan	Mempercepat legislasi dari Perda RTR 4 Danau di Sumbar
5	Kualitas Air Laut	Kab/Kota	Menurunnya kualitas air laut, muara sungai	Meningkatnya jumlah aktifitas di kawasan muara sungai, aktifitas pariwisata, limbah industri, dll	Kawasan permukiman di sempadan sungai dan pantai	Koordinasi dengan Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman, Satpol PP, Dinas Kebersihan, dll
						Melakukan pemantauan kualitas air laut secara berkala
			Abrasi pantai	Kurangnya pengelolaan sampah di kawasan pesisir/laut		Melakukan koordinasi dengan instansi terkait

No	Lingkup pelayanan	Stakeholder	Isu strategis/permasalahan	Faktor Pendorong Terjadinya permasalahan	Faktor Pendorong dari Faktor Pendorong	Arahan tindak lanjut/ Arahan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
				Minimnya tegakan di pinggir pantai (<i>mangrove</i>)		Sosialisasi kepada pemilik usaha/kegiatan dan masyarakat terkait pengelolaan kawasan pesisir laut/pantai
				Masih belum semua pantai yang dilengkapi sipil teknis pengamanan abrasi (Grip)		Koordinasi dengan Prasjal Tarkim
6	Pembinaan dan Pemulihan Kualitas Sumber Daya Alam (Program Menuju Indonesia Hijau (MIH))	Kab/Kota, Dishut, BKSDA, BPDAS, dll	Menurunnya jumlah tutupan vegetasi	Pembukaan lahan	Ladang berpindah	Peningkatan pengawasan oleh instansi terkait (Polhut)
				<i>Illegal logging</i>	Izin pinjam pakai kawasan hutan	Koordinasi dengan Dinas Kehutanan
				Pemanfaatan hutan oleh kegiatan non kehutanan	Alih fungsi lahan	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan kegiatan tutupan vegetasi di daerah
7	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca	Kab/Kota	Meningkatnya aktivitas pembakaran sampah, pembuangan sampah di sembarang tempat dan meningkatnya jumlah aktivitas yang membuang limbahnya ke sungai	Pelayanan pengangkutan sampah terangkutmasih rendah di setiap Kabupaten/Kota ke TPA. Hal ini mengakibatkan masih maraknya aktifitas pembakaran sampah	Belum semua kab/kota yang punya TPA <i>Sanitary Landfill</i>	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait (Dinas Kebersihan kab/kota, Dinas Pertamanan, BLHD kab/kota, dll)lainnya dan masyarakat
				Belum tersosialisasinya program pemilahan dan minimasi sampah seperti pengomposan dan daur ulang		Sosialisasi kepada masyarakat 3R, Bank sampah
8	Keanekaragaman Hayati	Kabupaten/Kota, BKSDA, Masyarakat, Korporasi, LSM Lingkungan	Masih banyak spesies yang terancam punah	Alih fungsi kawasan hutan	Pembukaan lahan perkebunan	Penyelesaian Tata batas kawasan hutan
						peningkatan fungsi kawasan penyangga
					Aktifitas ladang berpindah	Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan

No	Lingkup pelayanan	Stakeholder	Isu strategis/permasalahan	Faktor Pendorong Terjadinya permasalahan	Faktor Pendorong dari Faktor Pendorong	Arahan tindak lanjut/ Arahan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
				Perburuan liar	Nilai ekonomis dari satwa yang dilindungi tinggi	Meningkatkan koordinasi dengan instansi yang berwenang dan penegak hukum
				Pembangunan Infrastruktur jalan yang melewati kawasan hutan		Meningkatkan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pengawasan
			Masih kurangnya basis data keanekaragaman hayati	Belum semua kab/kota menyusun buku status Kehati		Provinsi membina kabupaten/kota untuk menyusun basis data KEHATI
			Belum berkembangnya Taman Kehati	Kab/kota terkendala penyediaan lahan		Fasilitasi dan pembinaan provinsi kepada kabupaten/kota membangun Taman KEHATI sesuai dengan arahan RTRW kab/kota
9	Kawasan konservasi	BKSDA, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas PU dan LSM Lingkungan	Tingginya tekanan terhadap kawasan konservasi	Kerusakan daerah penyangga kawasan konservasi	Kawasan penyangga beralih fungsi menjadi kawasan perkebunan, pertanian, permukiman dan kawasan budidaya lainnya	Melakukan pembinaan kepada masyarakat desa sekitar kawasan konservasi (Pengembangan konsep desa konservasi) Koordinasi pengamanan daerah penyangga dengan stakeholders terkait
10	Sumber Daya Lahan	Dinas ESDM, Bappeda, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian	Masih ada lahan bekas tambang yang belum direklamasi	Aktivitas pertambangan tanpa izin	Masyarakat tidak menyadari dampak negatif dari lahan bekas tambang	Melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pertambangan yang ramah lingkungan
				Pemilik konsesi yang tidak mematuhi AMDALnya	Biaya reklamasi yang cukup tinggi	Pembinaan kepada pemilik kegiatan dan penegakan hukum lingkungan
						Inisiasi penyusunan Perda RPPLH
			Masih tingginya luas	Banyak lahan yang ditelantarkan	Pemilik lahan pergi merantau	Penanaman lahan terlantar

No	Lingkup pelayanan	Stakeholder	Isu strategis/permasalahan	Faktor Pendorong Terjadinya permasalahan	Faktor Pendorong dari Faktor Pendorong	Arahan tindak lanjut/ Arahan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
			lahan kritis	pemiliknya		dengan tanaman produktif
				illegal logging	Belum optimalnya pengawasan dari pemerintah dan masyarakat	Pembinaan kepada aparaturnya dan masyarakat untuk ikut aktif menjaga kawasan hutan
				Kebakaran hutan dan lahan	Pembukaan lahan dengan dibakar oleh masyarakat/pengusaha	Peningkatan pengawasan dan koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
			Banyak daerah yang rawan longsor	Kondisi tanah yang labil	Kurangnya vegetasi sebagai tutupan lahan	Menggalakkan gerakan menanam pohon seperti
11	Adipura	kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan	Belum semua kabupaten/kota mengimplementasikan konsep kota bersih dan teduh	Tingkat pelayanan sampah masih rendah	Rasio Sampah terangkut ke TPA masih rendah	Pembinaan kepada kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan melalui adipura, gerakan Sumbar bersih, dan sosialisasi sampai ke tingkat nagari
					Konsep 3R belum berjalan optimal	Sosialisasi penerapan konsep 3R
					Masih ada TPA open dumping	Koordinasi peningkatan kapasitas pengelolaan sampah di TPA dengan dinas terkait
					Jumlah Bank sampah masih sedikit dan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan	Pembinaan Peningkatan aplikasi bank sampah di kabupaten/kota
				Masih terdapat genangan di kawasan perkotaan	saluran drainase belum berfungsi secara optimal	Peningkatan fungsi saluran drainase
				Belum optimalnya pengelolaan RTH Publik	Kendala penyediaan lahan	Mendorong kabupaten/kota untuk menyediakan lahan RTH sesuai dengan kriteria Adipura dan arahan RTRW kab/kota bersangkutan

No	Lingkup pelayanan	Stakeholder	Isu strategis/permasalahan	Faktor Pendorong Terjadinya permasalahan	Faktor Pendorong dari Faktor Pendorong	Arahan tindak lanjut/ Arahan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
	Sistem Informasi Lingkungan	Instansi Teknis Provinsi, Kabupaten/kota	Sulitnya memperoleh data dari OPD	Data tidak tersedia pada saat dibutuhkan		Membuat SOP SILH lingkup Prov Sumbar
						MoU dengan Biro Humas kab/kota terkait SILH
						Pengadaan jejaring informasi lingkungan hidup yang terhubung dengan 19 kab/kota
						Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung
			Terlambatnya data dari kabupaten/kota	Keterbatasan SDM dan anggaran untuk sarana dan prasarana		
			Informasi lingkungan hidup belum tersebarluaskan secara optimal dan realtime	Tidak ada dukungan data dari bidang-bidang		
				Kurangnya SDM pengelola SIL		Penugasan 1 orang staf untuk mengelola website Dinas Lingkungan Hidup
			Belum tersedianya laboratorium untuk uji parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi	Persyaratan akreditasi sesuai dengan kriteria SNI 17025 dan PermenLH 6/2009 belum bisa dipenuhi oleh laboratorium yang ada	Kelembagaan laborotorium belum terbentuk (minimal berbentuk UPT)	Pelatihan/Bimtek untuk SDM laboratorium lingkungan Prov dan kab/kota
						Surat Edaran Gubernur kepada kab/kota terkait kelembagaan Lab. Lingkungan
12	Penegakan Hukum Lingkungan	BLH Kab/Kota	Pengaduan dan Kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan terus meningkat	Minimnya tingkat penataan pemilik usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan Izin Lingkungan serta Perizinan Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Masih minimnya pemahaman dan komitmen pemilik usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban yang harus dipenuhi dalam melakukan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan perundang-	Meningkatkan Kapasitas SDM dalam melakukan penanganan Penegakan Hukum

No	Lingkup pelayanan	Stakeholder	Isu strategis/permasalahan	Faktor Pendorong Terjadinya permasalahan	Faktor Pendorong dari Faktor Pendorong	Arahan tindak lanjut/ Arahan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
					undangan lingkungan hidup.	
		Instansi Teknis Terkait Tingkat Provinsi dan Kab/kota		Belum optimalnya upaya penegakan hukum.	Pelanggaran yang ditemui dari fasilitasi penyelesaian pengaduan jarang yang ditindaklanjuti dengan penegakan hukum lingkungan	Meningkatkan koordinasi dengan semua stakeholder Tk. Prov dan Kab/kota
					Political will dari pimpinan daerah untuk melakukan penegakan hukum lingkungan masih kurang dalam penanganan pengaduan/kasus lingkungan	Memberikan arahan dan Stressing Gubernur dalam Rakor Bup/Wako.
					Seringnya terjadi mutasi personal yang membidangi hukum lingkungan (PPLHD dan PPNS) di Kab/kota	
		Aparat Penegak Hukum (POLRI dan Kejaksaan)		Makin meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat/kelompok masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik.		Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di kabupaten/kota
		Akademisi/PSLH				
		Lembaga Sosial Masyarakat				
		Media				

No	Lingkup pelayanan	Stakeholder	Isu strategis/permasalahan	Faktor Pendorong Terjadinya permasalahan	Faktor Pendorong dari Faktor Pendorong	Arahan tindak lanjut/ Arahan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
13	Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	BLH kab/kota	Masih terdapatnya pemilik usaha dan/atau kegiatan yang belum menindaklanjuti izin lingkungan dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup	Kurangnya Kepedulian pemilik usaha/kegiatan di dalam menindaklanjuti izin lingkungan dengan izin PPLH	Pemilik usaha dan/ atau kegiatan tidak taat	
					Pemilik usaha dan/ atau kegiatan belum memahami peraturan perundang-undangan	
					Terbatasnya kemampuan kab/kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan (SDM dan Anggaran)	Provinsi membantu melaksanakan pembinaan secara terkoordinasi dengan kabupaten/kota lokasi usaha dan/atau kegiatan
				Masih banyak perizinan kegiatan/usaha yang belum ditindaklanjuti oleh pemerintah kab/kota	Belum adanya kesamaan persepsi Kab/kota dalam penerbitan Izin Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penyamaan persepsi kabupaten/kota terkait penerbitan izin PPLH melalui Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan instansi LH se-Provinsi Sumbar
		Instansi Teknis Terkait Tingkat Provinsi dan Kab/kota	Masih terdapatnya izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang belum mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.	SDM Kab/Kota belum memiliki persepsi yang sama dalam penerbitan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.	Beragamnya pemahaman kab/kota terhadap aturan perizinan PPLH	Adanya pedoman umum dari Provinsi Sebagai acuan dalam mengeluarkan JUKLAK dan JUKNIS oleh Kab/kota

No	Lingkup pelayanan	Stakeholder	Isu strategis/permasalahan	Faktor Pendorong Terjadinya permasalahan	Faktor Pendorong dari Faktor Pendorong	Arahan tindak lanjut/ Arahan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
14	Penyelenggaraan Amdal/UKL-UPL	Instansi lingkungan hidup kabupaten/kota	Belum semua Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki Komisi Penilai Amdal berlisensi.	Tidak semua kab/kota yang memenuhi persyaratan untuk memiliki komisi penilai AMDAL berlisensi	Political will dari pemkab/pemko untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan instansi lingkungan hidup (setingkat eselon II) dan peningkatan kapasitas SDM lingkungan untuk pemenuhan persyaratan lisensi komisi AMDAL masih kurang.	Melakukan pembinaan dan koordinasi secara kontinu terutama terhadap kab/kota yang padat investasi dan kegiatan pembangunan yang belum memiliki Komisi Penilai Amdal berlisensi.
					Kurangnya pemahaman aparat Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap persyaratan lisensi Komisi Penilai Amdal sesuai ketentuan yang berlaku.	Adanya dukungan dan himbauan provinsi kepada pemerintah kab/kota untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan dan peningkatan SDM
		Instansi/OPD terkait provinsi		Keterbatasan SDM.	Adanya pandangan Pemerintah Kabupaten/Kota bahwa permasalahan lingkungan di daerah yang bersangkutan belum begitu kompleks, sehingga urusan lingkungan hidup belum merupakan suatu hal yang prioritas, dan peningkatan status/kapasitas kelembagaan belum merupakan suatu hal yang penting.	Meningkatkan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait dalam upaya peningkatan status/kapasitas kelembagaan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
		Perguruan tinggi	Belum optimalnya penatalaksanaan penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL di kabupaten/kota	Masih kurangnya pemahaman terhadap SOP/NSPK terkait penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL. Ada komisi AMDAL kab/kota yang belum punya SOP/NSPK	Pemerintah kabupaten/kota belum sepenuhnya mempedomani SOP/NSPK terkait penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja penatalaksanaan penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan di kabupaten/kota.

No	Lingkup pelayanan	Stakeholder	Isu strategis/permasalahan	Faktor Pendorong Terjadinya permasalahan	Faktor Pendorong dari Faktor Pendorong	Arahan tindak lanjut/ Arahan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
		Institusi/organisasi kemasyarakatan	Belum semua pemilik/ penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengimplementasikan dokumen lingkungan yang dimiliki.	Masih kurangnya komitmen penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mengimplementasikan dokumen lingkungannya.	Masih minimnya pemahaman penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan kegiatannya sesuai dokumen lingkungan yang dimiliki.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan/implementasi dokumen lingkungan yang dilakukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
		Masyarakat terkena dampak				
		Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan				
15	Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Instansi/OPD terkait provinsi	Belum semua dokumen perencanaan (KRP) yang dilengkapi dokumen KLHS.	Masih kurangnya pemahaman Pemerintah Kabupaten/kota dan <i>stakeholder</i> terhadap aturan/keputusan terkait pelaksanaan KLHS.	Masih kurangnya sosialisasi/pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan <i>stakeholder</i> terhadap aturan/keputusan terkait pelaksanaan KLHS	Meningkatkan kapasitas SDM Pemerintah Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan terkait pelaksanaan KLHS.
		Instansi/OPD terkait kabupaten/kota		Anggaran penyusunan dan pelaksanaan KLHS yang tidak disediakan kab/kota	Kurangnya komitmen kab/kota untuk melaksanakan KLHS	Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pelaksanaan KLHS.
		Perguruan tinggi/akademisi				
		Institusi/organisasi kemasyarakatan				Stressing Gubernur ke Kab/kota melalui Rakor kab/kota se-Sumbar
		Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan				
		Perwakilan masyarakat				

Bab III TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) nasional pada tahun 2013 adalah 63,13 dan ditargetkan meningkat menjadi 68,5 pada tahun 2019 (RPJMN Tahun 2015-2019).

Beberapa kebijakan nasional yang harus didukung oleh Provinsi Sumatera Barat antara lain adalah:

1. Adipura
2. Adiwiyata
3. Proper
4. Kalpataru
5. Proklam
6. Tutupan Vegetasi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Berdasarkan isu strategis lingkup pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

Tujuan:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat;
2. Meminimalisir terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

Sasaran:

1. Terkendalnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari usaha/kegiatan;
2. Ditaatinya mekanisme, implementasi izin lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3. Meningkatnya efektifitas penanganan kasus lingkungan hidup dan penataan hukum lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat;
4. Meningkatnya peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup;

Hubungan antara tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat;	Terkendalnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari usaha/kegiatan;	- Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU)

		Meningkatnya peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup;	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi <i>passing grade</i> Adipura dan Gerakan Sumber Bersih - Persentase peningkatan keikutsertaan dalam kegiatan penghargaan lingkungan (Adiwiyata dan Kalpataru) - Usaha/Kegiatan peringkat biru PROPER yang mengalokasikan CSR untuk pengelolaan LH - Persentase Bank Sampah yang aktif dari seluruh Bank Sampah yang terdata Tahun 2015
2	Meminimalisir terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Ditaatinya mekanisme, implementasi izin lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	<p>Persentase Komisi Penilai AMDAL (KPA) kab/kota yang telah mengimplementasikan Standar Operating Procedure (SOP) sesuai peraturan perundang-undangan</p> <p>Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup</p> <p>Persentase dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dilengkapi Kajian Lingkungan Hidup Strategis</p> <p>Persentase kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan</p>
		Meningkatnya efektifitas penanganan kasus lingkungan hidup dan penataan hukum lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat.	

3.3. Program dan Kegiatan

Usulan Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WAJIB								
	Lingkungan Hidup				9,107,000,000				9,806,000,000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	1,398,795,144			100%	2,004,000,000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai, paket pengiriman surat dan BBM yang disediakan	DLH	1 tahun	36,000,000	APBD		1 tahun	65,000,000
	Penyediaan jasa komunikasi,air dan listrik	Pembayaran rekening listrik, telepon, air, faximile, internet,	DLH	12 bulan	258,000,000	APBD		12 bulan	338,000,000
	Penyediaan jasa kebersihan, pengaman dan sopir kantor	Pembayaran honorarium jasa kebersihan, pengaman dan sopir kantor	DLH	1 tahun	575,106,020	APBD		1 tahun	550,000,000
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	DLH	36 jenis	43,000,000	APBD		36 jenis	500,000,000
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	DLH	13 jenis	45,000,000	APBD		13 jenis	50,000,000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan	DLH	6 komponen	10,000,000	APBD		6 komponen	11,000,000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah media/surat kabar harian yang disediakan	DLH	12 bulan	23,940,000	APBD		12 bulan	37,000,000
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum kantor	DLH	650 kotak	32,500,000	APBD		650 kotak	54,000,000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	Jumlah pelaksanaan konsultasi dan koordinasi ke dalam dan luar daerah		37 kali	320,249,124	APBD		37 kali	350,000,000
	Penyediaan Jasa Informasi Dokumenter dan Publikasi	Terlaksananya penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi	DLH	12 bulan	30,000,000	APBD		12 bulan	30,000,000
	Pendataan dan penataan dokumen/arsip	Jumlah bahan kelengkapan penetapan arsip lingkungan hidup	DLH	10 meter lari	25,000,000	APBD		10 meter lari	19,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur		100%	830,000,000			100%	1,194,000,000
	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	DLH	1 paket	50,000,000	APBD		1 paket	50,000,000
	Pengadaan meubeleu	Jumlah unit meubeleu yang diadakan	DLH	4 jenis	155,000,000	APBD		4 jenis	175,000,000
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	DLH	8 jenis	160,000,000	APBD		8 jenis	170,000,000

		Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi	Tersedianya PC, laptop/notebook, printer, scanner	DLH	3 jenis	76,000,000	APBD		3 jenis	176,000,000
		Pengadaan Alat Studio, Komunikasi dan Informasi	Tersedianya alat-alat studio, komunikasi dan informasi	DLH	8 jenis	150,000,000	APBD		8 jenis	97,000,000
		Pengadaan kendaraan Dinas	Jumlah unit Kendaraan yang diadakan	DLH	1 unit	-	APBD		1 unit	260,000,000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pengecatan kantor, pemeliharaan pekarangan	DLH	7 paket	75,000,000	APBD		7 paket	85,000,000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya suku cadang, pajak STNK dan asuransi kendaraan	DLH	6 unit roda empat	98,000,000	APBD		6 unit roda empat	108,000,000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan AC, komputerisasi dan moubiler	DLH	3 jenis	38,000,000	APBD		3 jenis	42,000,000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Terlaksananya pemeliharaan instalasi dan jaringan listrik, telp dan air	DLH	12 bulan	28,000,000	APBD		12 bulan	31,000,000
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas		100%	49,766,400			100%	60.000.000
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas PNS dan PTT	DLH	66 stel	49,766,400	APBD		70 Pegawai	60,000,000
		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terpenuhinya peningkatan sumber daya aparatur		100%	110,000,000			100%	121.000.000
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah keikutsertaan aparatur dalam mengikuti bimtek implementasi peraturan Perundang-undangan	DLH	34 kali	110,000,000	APBD		12 kali	121,000,000
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD		100%	190,733,576			100%	345,000,000
			Nilai LAKIP SKPD (minimal BB)		BB				BB	
			Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan		100%				100%	
			Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra SKPD		100%				100%	
			Persentase kesesuaian usulan renja dengan RPJMD		100%				100%	
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja Dinas Lingkungan Hidup	DLH	9 dokumen	35.000.000	APBD		9 dokumen	18.000.000
		Penata usahaan keuangan OPD	Pembayaran honorarium pengelolaan keuangan	DLH	12 bulan	155.733.576	APBD		12 bulan	157.000.000
		Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Asset	Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra SKPD		100%	85,504,880			100%	78,000,000
			Persentase kesesuaian usulan renja dengan RPJMD		100%				100%	

		Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran lingkungan hidup	DLH	9 dokumen	26,000,000	APBD		17,000,000
		Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Pembayaran honor pengawasan dan pengendalian aset SKPD	DLH	12 bulan	59,504,880	APBD		61,000,000
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	IKLH		71,13	4,300,000,000		71,13	4,610,000,000
		Pengawasan Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Jumlah objek/kegiatan yang dilakukan wasdal terhadap kerusakan lingkungan (lahan pertambangan dan lahan akses terbuka)	Kab. Pasaman, Kab. Dharmasraya, Kab. Sijunjung, Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Tanah Datar, Kab. Agam dan Kota Sawahlunto	12 objek / kegiatan	350,000,000	APBD	12 objek / kegiatan	350,000,000
		Pengawasan pengendalian terhadap pengelolaan lingkungan usaha/kegiatan	Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan wasdal pengelolaan lingkungan		18 kegiatan / usaha	200,000,000	APBD	20 kegiatan / usaha	250,000,000
		Pengkajian Penetapan Status Mutu Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah sungai yang ditetapkan status mutu air lintas kabupaten/kota		1 sungai	0		1 sungai	90.000.000
		Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah)	Jumlah objek kegiatan yang dinilai kinerja pengelolaan lingkungan hidupnya		18 kegiatan	200,000,000	APBD	19 kegiatan	225,000,000
		Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi	Jumlah sungai yang didata kualitas air serta sumber pencemarnya sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaannya		12 sungai	570,000,000	APBD	13 sungai	520,000,000
		Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penurunan Beban Pencemaran Sungai	Terbentuknya percontohan pengelolaan limbah cair		2 klaster	300,000,000	APBD	2 klaster	400,000,000
			dokumen kajian		1 dokumen			1 dokumen	
		Pemantauan Kualitas Udara Ambient	Jumlah Kab/Kota yang dipantau kualitas udara ambiennya	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	190,000,000	APBD	19 Kab/Kota	205,000,000
		Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Adipura)	Jumlah Kab/Kota yang dibina		15 Kab/Kota	195,000,000	APBD	16 Kab/Kota	200,000,000
		Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih	Terlaksananya pembinaan dan penilaian kecamatan/kelurahan bersih Tk. Provisi	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	350,000,000	APBD	19 Kab/Kota	360,000,000
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah peningkatan aplikasi bank sampah		5 bank sampah	85,000,000	APBD	5 bank sampah	95,000,000
			Jumlah Kab/Kota yang dibina terkait aplikasi bank sampah dan	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota			19 Kab/Kota	

			peningkatan implementasi konsep 3R							
			Jumlah peserta workshop bank sampah		55 orang			60 orang		
			Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dasar dan menengah dalam pelestarian lingkungan hidup		61 sekolah	675,000,000	APBD	67 sekolah	700,000,000	
			Jumlah pilot project sekolah Adiwiyata		2 sekolah			2 sekolah		
			Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca sektor Pengelolaan Limbah	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	125,000,000	APBD	19 Kab/Kota	135,000,000	
			Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Program Kampung Iklim)	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	175,000,000	APBD	19 Kab/Kota	185,000,000	
			Peningkatan Program Pelindungan Lapisan Ozon dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim.		17 Kab/Kota	130,000,000	APBD	17Kab/Kota	100,000,000	
			Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Sosialisasi dampak perubahan iklim dan penggunaan bahan perusak ozon	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota			-		
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	19 Kab/kota	19 kab/kota	90,000,000	APBD	PPSP merupakan program nasional yang harus didukung provinsi	19 kab/kota	95.000.000
			Peningkatan Pengembangan Laboratorium Lingkungan		12 Kab/Kota	120,000,000	APBD	13 Kab/Kota	150,000,000	
			Pilot Project Eko dan Edu Wisata Kawasan Mandeh		1 paket	100,000,000	APBD	1 paket	200,000,000	
			Publikasi dan media pembelajaran kehati		-	-		1 paket		
			Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	19 Kab/Kota	70 org	215,000,000	APBD	19 Kab/Kota	200,000,000	
			Jumlah Kab/Kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota			19 Kab/Kota		
			Penetapan dan evaluasi Baku Mutu Limbah Cair kegiatan		1 kegiatan ditetapkan dan 1 Pergub dievaluasi	230,000,000	APBD	1 kegiatan ditetapkan	150,000,000	
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	IKLH	71,13	592,000,000		71,36	585,000,000	

		Peningkatan Konservasi kualitas air danau di Provinsi Sumatera Barat	Jumlah danau yang dikoordinasikan peranserta stakeholder, masyarakat dan dunia usaha-nya dalam pelestarian ekosistem danau	Kab. Agam, Kab. Solok dan Kab. Tanah Datar	4 danau (Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau Diatas dan Danau Dibawah)	120,000,000	APBD		4 danau	125,000,000
		Peningkatan Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Laut	Jumlah Kab/Kota kawasan pesisir pantai dan muara sungai yang dipantau kualitas air lautnya	Kota Padang, Kota Pariaman, Kab. Padang Pariaman, Kab, Agam, Kab, Pasaman Barat dan Kab. Pesisir Selatan	6 Kab/Kota	132,000,000	APBD		6 Kab/Kota	100,000,000
		Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (Penerapan CSR Bidang Lingkungan Hidup)	Jumlah perusahaan yang dibina dalam pelaksanaan program CSR bidang lingkungan hidup		8 perusahaan	95,000,000	APBD		8 perusahaan	100,000,000
		Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Sumatera Barat	Jumlah taman kehati yang dibina		5 kab/kota	85,000,000	APBD		5 kab/kota	90,000,000
			Jumlah kab yg dibina dlm pengelolaan tutupan vegetasi		12 Kab/Kota				12 Kab/Kota	
		Penguatan Nagari/Kelurahan dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Jumlah nagari/kelurahan yang dilakukan penguatan		2 nagari / kelurahan 2000 bibit	160,000,000	APBD		2 nagari / kelurahan 2000 bibit	170,000,000
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase pengembangan sistem dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup		60%	465,200,000			80%	630,000,000
		Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru)	Jumlah calon yang dibina untuk di usulkan sebagai calon penerima Kalpataru tingkat nasional		9 orang/kelompok	120,000,000	APBD	Penghargaan Kalpataru diselenggarakan Pemerintah Pusat setiap tahun	9 orang/kelompok	130,000,000
		Penyusunan Data dan Analisis Kualitas Lingkungan Provinsi Sumatera Barat	Jumlah buku SLHD Prov. Sumbar yang dicetak		40 buku	260,000,000	APBD		40 buku	270,000,000
			Jumlah Kab/Kota yang ditetapkan sebagai Penyusun Buku SLHD terbaik Tingkat Propinsi Sumatera Barat		5 kab/kota				5 kab/kota	
		Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah Rangkaian acara Edukasi dan Kampanye Lingkungan Hidup		4 even	85,200,000	APBD		4 even	110.000.000
		Sistim Informasi Lingkungan	Jumlah paket pembuatan Sistem Informasi Lingkungan		1 paket	-	APBD	Implementasi UU No,14 Tahun 2008 ttg Pelayanan Informasi Publik	1 paket	120,000,000
		Program Penaatan Hukum Lingkungan Hidup	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati peraturan perundang-undangan		70%	1,025,000,000			75%	400,000,000

			Pembinaan dan Evaluasi kinerja penatalaksanaan proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hidup	Jumlah kabupaten/kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL-nya		11 kabupaten/kota	125,000,000	APBD		12 kabupaten/kota	140,000,000
				Jumlah kabupaten/kota yang dibina/diverifikasi terkait pengajuan lisensi Komisi Penilai Amdal-nya		6 kabupaten/kota				6 kabupaten/kota	
			Pembinaan KLHS Terhadap Dokumen Perencanaan	Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam pelaksanaan KLHS terhadap dokumen perencanaan		5 Kab/Kota	120,000,000	APBD		5 Kab/Kota	120,000,000
			Pembinaan Hukum Lingkungan Hidup dan Perizinan	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan hukum dan perizinan LH serta terhimpunnya data hasil pembinaan hukum dan perizinan lingkungan		10 Kab/Kota	250,000,000	APBD		12 Kab/Kota	175,000,000
				Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan menaati peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan perizinan.		5 objek				7 objek	
			Penaatan Hukum Lingkungan	Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan dan kegiatan dan/atau usaha yang dijadikan objek penegakan hukum		7 kasus	200,000,000	APBD		7 kasus	300,000,000
				Jumlah objek yang dilakukan monitoring dan evaluasi dan implementasi penreapan sanksi		10 objek				10 objek	
			Pengkajian Pengembangan Kebijakan Wilayah	Bimtek penyusunan dokumen daya dukung daya tampung lingkungan Kab/Kota		50 orang	390,000,000	APBD		-	-
				Jumlah Kab/Kota yang dibina dan dievaluasi penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota				19 Kab/Kota	70,000,000
				Ranperda RPPLH		1 Perda				-	-

Bab IV PENUTUP

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 merupakan penjabaran pra Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2020 dan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 2005-2025.

RENJA-OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 merupakan pedoman/acuan bagi unit kerja lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana kegiatan pada bidang-bidang dan sekretariat pada OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan pembangunan lingkungan hidup 2018 dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku serta mempedomani arahan perencanaan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat berkewajiban untuk melaksanakan RENJA-OPD ini sesuai dengan yang termuat di dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat.
3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup berkewajiban menjamin konsistensi antara rancangan RPJM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020 dengan pra Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat .

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RENJA-OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban untuk melakukan pemantauan pelaksanaannya.